

THE ROLE OF FISCAL POLICY IN REDUCING INCOME INEQUALITY IN INDONESIA

Syifa Unnadhiro¹, Dytia Dwi Kusuma², Luluk Amaria Said³

syifaunnadhiro77@gmail.com¹, dytadwik19@gmail.com², amarialuluk@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRACT

This study analyzes the role of fiscal policy in reducing income inequality in Indonesia from 2010 to 2025. Using a qualitative approach based on literature review and secondary data, the research explores how fiscal instruments, particularly progressive taxation, social spending, and infrastructure investment, contribute to income redistribution. The findings indicate that fiscal policy has moderately improved income equality, as reflected in the decline of Indonesia's Gini ratio from 0.384 in 2021 to 0.375 in 2025. Progressive taxation and targeted social programs such as Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), and the Pre-Employment Card have enhanced purchasing power among low-income groups, while infrastructure development has expanded economic access in underdeveloped regions. However, fiscal policy implementation still faces major challenges, including a low tax-to-GDP ratio, limited administrative capacity, and uneven budget realization across regions. The study concludes that effective fiscal synergy, combining equitable taxation, accurate social targeting, and inclusive infrastructure planning, is essential to achieving sustainable and socially just economic growth in Indonesia.

Keywords: *Fiscal Policy, Income Inequality, Progressive Taxation, Social Spending, Infrastructure Development.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh setiap tahun, pemerataan hasil pembangunan belum terjadi secara merata. Sebagian masyarakat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi dengan cepat, sementara sebagian lainnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini terlihat dari rasio Gini, ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan, yang pada Maret 2025 berada di angka 0,375, hanya turun sedikit dari 0,381 pada September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi meskipun sudah ada perbaikan kecil menurut Badan Pusat Statistik. Data juga menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Pada Maret 2025, rasio Gini di kota mencapai 0,395, sedangkan di desa 0,299. Masyarakat di kota cenderung memiliki jarak pendapatan yang lebih lebar dibandingkan masyarakat di desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi semakin meluas, manfaatnya belum dirasakan secara merata di semua wilayah Indonesia. Salah satu penyebab utama ketimpangan adalah perbedaan kesempatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Masyarakat dengan pendidikan tinggi dan keterampilan khusus lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Sementara itu, sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti buruh atau petani kecil, cenderung memiliki pendapatan yang tidak stabil. Perbedaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi juga memperparah kesenjangan ini.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Pemerintah bisa menggunakan instrumen pajak, subsidi, dan belanja negara untuk mengurangi ketimpangan. Melalui sistem pajak, pemerintah dapat menarik lebih banyak pajak dari masyarakat berpendapatan tinggi dan menggunakan dana tersebut untuk membantu kelompok berpendapatan rendah melalui program bantuan sosial, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan program pembangunan infrastruktur dasar. Pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menekan ketimpangan. World Bank (2024) mencatat bahwa pengaruh kombinasi pajak dan pengeluaran publik di Indonesia hanya mampu menurunkan indeks Gini sekitar 2,5 poin. Salah satu penyebabnya adalah rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang masih rendah, yaitu hanya sekitar 10,9% pada tahun 2021, jauh di bawah rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik yang mencapai 19,8%. Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak masih terbatas. Belanja sosial pemerintah sering kali belum tepat sasaran. Program subsidi energi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi, padahal seharusnya bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun pemerintah sudah mulai mengalihkan sebagian dana subsidi ke program bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitasnya masih bergantung pada ketepatan data penerima bantuan dan efisiensi penyaluran.

Pandemi COVID-19 dan berbagai krisis global memperburuk ketimpangan pendapatan di Indonesia. Banyak pekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan, sementara sebagian pekerja di sektor formal masih bisa bekerja dari rumah dan mendapatkan penghasilan tetap. Kondisi ini memperlebar jarak antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Setelah pandemi mereda, pemerintah berusaha memperkuat program pemulihan ekonomi melalui belanja negara dan stimulus fiskal, tetapi dampaknya terhadap pemerataan masih belum optimal. Meski demikian, ada tanda-tanda positif dari kebijakan fiskal yang mulai diarahkan untuk memperbaiki pemerataan. Pemerintah terus memperluas program perlindungan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Prakerja. Program-program ini membantu masyarakat miskin agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan keterampilan, dan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Pemerintah juga memperbanyak investasi di sektor infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik di daerah tertinggal, yang dapat meningkatkan akses ekonomi masyarakat di luar Pulau Jawa. Peningkatan penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Provinsi dengan penerimaan pajak yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sistem perpajakan, termasuk penerapan pajak progresif yang lebih adil dan penegakan hukum pajak yang tegas, dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi alat pemerataan ekonomi, tetapi perlu perbaikan dalam hal efektivitas penerimaan pajak, ketepatan sasaran belanja publik, dan transparansi pengelolaan anggaran.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan fiskal berperan dalam menanggulangi ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan melihat sejauh mana instrumen fiskal seperti pajak, subsidi, dan belanja pemerintah mampu mendorong pemerataan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu mengenai kebijakan fiskal dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Melalui studi pustaka, penulis dapat memahami hubungan antara kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dengan upaya pemerataan pendapatan masyarakat secara mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku ekonomi publik dan kebijakan fiskal, artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, serta data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan World Bank. Data dan teori yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk menemukan pola, kesamaan, maupun perbedaan pandangan antarpeneliti. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan isi literatur yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan mengaitkannya dengan kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio Gini Indonesia pada tahun 2010 sebesar 0,378, kemudian naik menjadi 0,414 pada tahun 2014, yang menunjukkan bahwa ketimpangan sempat meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa itu. Setelah 2015, ketimpangan mulai menurun secara perlahan hingga mencapai 0,381 pada Maret 2020 sebelum pandemi COVID-19. Ketika pandemi melanda

pada 2020–2021, ketimpangan sempat meningkat menjadi sekitar 0,384, karena banyak pekerja berpenghasilan rendah kehilangan pekerjaan, terutama di sektor informal. Sementara itu, kelompok masyarakat dengan pekerjaan tetap dan aset keuangan relatif lebih aman. Setelah pandemi mereda, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif melalui program bantuan sosial (PKH dan BLT) serta stimulus ekonomi, sehingga rasio Gini kembali menurun menjadi 0,379 pada Maret 2024 dan 0,375 pada Maret 2025. Tren ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal mampu membantu menurunkan ketimpangan, tetapi dampaknya masih terbatas karena penerimaan pajak Indonesia yang rendah (sekitar 10,9% dari PDB) membatasi kapasitas redistribusi pemerintah. Ketimpangan di Indonesia juga berbeda antarwilayah. Pada Maret 2025, rasio Gini wilayah perkotaan sebesar 0,395, jauh lebih tinggi dibanding pedesaan yang sebesar 0,299. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendapatan di kota lebih timpang karena sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok menengah atas yang bekerja di sektor formal dan memiliki aset produktif. Daerah seperti DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta cenderung memiliki ketimpangan tertinggi, sedangkan Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara termasuk yang paling rendah. Hal ini terjadi karena akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lapangan kerja jauh lebih besar di wilayah maju dibandingkan wilayah terpencil. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketimpangan seringkali lebih tinggi di daerah dengan urbanisasi cepat tetapi distribusi kesempatan ekonomi yang tidak seimbang. Beberapa faktor struktural memperkuat ketimpangan di Indonesia. Perbedaan sektor ekonomi. Daerah yang masih bergantung pada pertanian memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah dibanding wilayah dengan industri dan jasa modern. Pembangunan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa membuat investasi, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi menumpuk di satu wilayah. Ketiga, keterbatasan lapangan kerja formal dan perbedaan upah antar sektor membuat sebagian besar tenaga kerja tetap berada di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil.

Pajak progresif memainkan peran penting dalam teori redistribusi: melalui tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan tinggi, pemerintah dapat mengambil sebagian pendapatan mereka dan mengalokasikannya kembali ke masyarakat yang lebih lemah, sehingga membantu mempersempit jarak pendapatan antar kelompok. Sistem perpajakan mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-daerah. Namun, rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah, tercatat sekitar 9,1 % pada 2021, jauh di bawah negara tetangga. Evaluasi sistem perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi pajak konsumtif seperti PPN dan rendahnya tarif pajak langsung progresif membuat peran redistribusi pajak masih terbatas. Sebuah kajian dari World Bank menyebut bahwa selisih potensi penerimaan dan realisasi dari PPN dan Pajak Penghasilan mencapai sekitar 6,4 % dari PDB antara 2016-2021. Kajian lain menunjukkan bahwa pajak dan pengeluaran pemerintah pada periode 2012-2017 membantu menurunkan ketimpangan sekitar 2,5 poin Gini. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, termasuk usaha kecil menengah yang masih banyak terlewat, dan struktur pajak yang banyak mengandalkan pajak konsumtif sehingga kurang efektif dalam redistribusi. Contohnya, pajak konsumtif cenderung sama berlakunya untuk semua lapisan masyarakat, sehingga kurang menekan kelompok kaya secara proporsional. Pemerintah Indonesia menjalankan sejumlah program bantuan sosial utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Prakerja. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan menyediakan akses pendidikan atau pelatihan kerja. Sebuah studi literatur menemukan bahwa bantuan sosial tunai terbukti menurunkan kemungkinan anak dari keluarga penerima menjadi miskin hingga 19,4 poin. Meski demikian, efektivitas program ini di lapangan belum optimal, studi menunjukkan bahwa program bantuan sosial meskipun memiliki dampak positif dalam jangka pendek, masih menghadapi

kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima, data penerima yang kurang mutakhir, dan alokasi anggaran yang terbatas.

Kebijakan fiskal yang efektif tidak berdiri sendiri. Sinergi antara pajak progresif, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan efek redistributif yang jauh lebih kuat dibandingkan ketika instrumen tersebut berjalan terpisah. Pajak progresif berfungsi mengumpulkan dana dari kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan belanja sosial dan infrastruktur menyalurkan kembali dana itu ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal. Siklus kebijakan fiskal dapat memperkuat pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerintah Indonesia sejak 2015 telah melakukan pengalihan subsidi energi yang sebelumnya banyak dinikmati kelompok menengah ke atas, ke arah program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar. Pengurangan subsidi bahan bakar memungkinkan pemerintah menghemat anggaran hingga lebih dari 200 triliun rupiah per tahun, yang kemudian dialokasikan untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan pembangunan infrastruktur desa. Langkah ini memperkuat dampak redistribusi karena bantuan sosial meningkatkan daya beli langsung masyarakat miskin, sementara infrastruktur menciptakan akses ekonomi jangka panjang, seperti membuka peluang kerja dan menurunkan biaya logistik di daerah terpencil. Berdasarkan teori ekonomi publik, sinergi seperti ini dikenal sebagai “fiscal multiplier of equity”, di mana setiap rupiah pengeluaran publik yang tepat sasaran mampu menciptakan manfaat ekonomi berganda bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Efisiensi dan ketepatan sasaran merupakan faktor penting agar kebijakan fiskal benar-benar menurunkan ketimpangan. Transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi kunci dalam memastikan bahwa pajak dan belanja publik digunakan sesuai tujuan redistributifnya. Menurut OECD (2023), negara dengan sistem pelaporan fiskal yang terbuka dan partisipasi publik tinggi cenderung memiliki dampak fiskal yang lebih efektif terhadap pemerataan pendapatan. Di Indonesia, tantangan muncul pada implementasi kebijakan di tingkat daerah. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan data penerima bantuan, kapasitas administratif yang lemah, dan realisasi anggaran yang tidak merata antarwilayah. Laporan Bappenas (2023) mencatat bahwa sekitar 15–20% belanja sosial daerah belum sepenuhnya terserap akibat lemahnya koordinasi dan perencanaan anggaran. Kondisi ini menurunkan efektivitas kebijakan fiskal secara keseluruhan. Teori ekonomi publik menjelaskan bahwa efektivitas belanja pemerintah tergantung pada “allocative efficiency”, yaitu sejauh mana belanja publik dialokasikan pada sektor yang memberi manfaat sosial terbesar. Jika kebijakan pajak progresif dikombinasikan dengan belanja sosial dan infrastruktur yang efisien serta transparan, maka efek redistribusi akan optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan ketimpangan secara berkelanjutan.

Kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terbukti memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi dalam jangka pendek. Pemerintah berhasil meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan menjaga stabilitas konsumsi selama masa pandemi COVID-19. Program bantuan tunai di Indonesia mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 1,5 juta jiwa pada tahun pertama implementasinya.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal terbukti menanggulangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Melalui kombinasi pajak progresif, belanja sosial, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah mampu menyalurkan kembali sumber daya dari kelompok berpendapatan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah serta wilayah tertinggal. Data menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia menurun dari 0,384 pada 2021 menjadi 0,375 pada 2025, menandakan adanya perbaikan pemerataan meskipun masih terbatas. Kebijakan seperti pengalihan subsidi energi, program PKH dan BLT, serta pembangunan infrastruktur dasar terbukti memperkuat daya beli

masyarakat miskin dan membuka akses ekonomi baru. Efektivitas kebijakan fiskal masih terkendala oleh rasio pajak yang rendah, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, dan ketimpangan realisasi anggaran antarwilayah. Indonesia perlu memperkuat reformasi pajak, transparansi anggaran, dan integrasi antara belanja sosial dan infrastruktur agar kebijakan fiskal benar-benar mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Agussalim, Nursini Nursini, Sultan Suhab, Randi Kurniawan, Salman Samir, and Tawakkal Tawakkal. "The Path to Poverty Reduction: How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia?" *Economies* 12, no. 12 (2024): 316.
- Aulia, Gita. "Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Analisis Regresi Kuantil." *PARAHYANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT REVIEW* 3, no. 2 (2024): 108–17.
- Aziz, Harry Azhar, Nisful Laili, and Gigih Prihantono. "The Impact of Fiscal Policy Impact on Income Inequality and Economic Growth: A Case Study of District/City in Java." *Journal of Indonesian Applied Economics* 6, no. 2 (2016): 229–44.
- Chayyani, Nuri Resti. "Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional." *The Indonesian Institute*, 2021.
- Chrisamba, Galaxi, and Birgitta Dian Saraswati. "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33 Provinsi Di Indonesia." *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 6, no. 1 (2016): 42.
- Clements, Benedict, Ruud de Mooij, Maura Francese, Sanjeev Gupta, and Michael Keen. "Fiscal Policy and Income Inequality: An Overview." *Inequality and Fiscal Policy*, 2015.
- Edison, Edison, and Muhammad Andriansyah. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia." *Journal Development* 11, no. 2 (2023): 134–46.
- Febryansyah, Muhammad Rafly, and Juliana Putri. "Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2025): 1640–48.
- Handini, Nasya, Mely Darwina, and Mellyana Candra. "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia." *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary* 2, no. 1 (2025).
- Hardinandar, Fajrin. "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Trade-off Antara Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen* 16, no. 1 (2020): 1–10.
- Heliany, Ina. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia." In Prosiding Seminar Stiami, 8:15–21, 2021.
- Huda, Roy Abdul, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, and Anas Malik. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang." *Kalianda Halok Gagasan* 7, no. 2 (2024): 189–201.
- Maulidi, Teguh Rochmat, Taufiq C Dawood, and Miksalmina Miksalmina. "Credit, Fiscal Policy, and Income Inequality: Empirical Study from Indonesia." *International Journal of Business, Economics, and Social Development* 3, no. 2 (2022): 93–98.
- Mujasmara, Fildzah Darayani, Rebecka Tri Talita Panggabean, Rizki Samora Muliana, Eko Wahyu Nugrahadi, and Muammar Rinaldi. "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2986–97.
- Sari, Anggun Puspita, and Nor Fadilah. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan." *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025): 500–506.
- Sari, Fitri Mustika, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, and Arif Fadilla. "Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1, no. 4 (2024): 1–10.
- Wijono, Tiana S, and Ike Atikah Ratnamulyani. "Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Untuk Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora* 2,

no. 1 (2011): 1–13.

- Yuliani, Novi Mela, Iwan Ridwan Paturochman, Agus Triana Mubarok, and Rizki Ali Muzaki. “Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2025): 296–300.
- Zai, Septiniat, and Ani Susanti Sabailaket. “Analisis Peran Kebijakan Fisikal Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Berkembang.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 8–14.